

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	57 persen	57 persen	62 Persen	66 Persen	69 Persen	72 Persen	75 Persen	75 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	0.0004	0.0004	0.00035	0.00032	0.00031	0.00028	0.00026	0.00026		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	6 persen	6 persen	7 persen	8 Persen	9 Persen	10 Persen	11 Persen	11 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	n/a	n/a	15 Kalurahan	30 Kalurahan	45 Kalurahan	60 Kalurahan	75 Kalurahan	75 Kalurahan		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	n/a	70 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Persen	30,67 Persen	30,67 Persen	37,33 Persen	42,67 Persen	48 Persen	53,33 Persen	58,67 Persen	58,67 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Unit	n/a	n/a	14,28 Persen	28,57 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	5 unit		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	144,57 Persen	147,57 Persen	149 Persen	151 Persen	153 Persen	155 Persen	157 Persen	157 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	n/a	24 Persen	22,67 Persen	21,33 Persen	20 Persen	18,67 Persen	17,33 Persen	5 Kalurahan		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	n/a	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	14,98 persen	20,73 Persen	33,03 Persen	35,37 Persen	44,74 Persen	54,58 Persen	64,89 Persen	64,89 Persen		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Persen	66,67 Persen	n/a	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	90 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	27,79 Persen	n/a	30 Persen	32 Persen	34 Persen	36 Persen	38 Persen	38 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	n/a	n/a	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan	1 penghargaan	n/a	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	5 penghargaan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	0 Persen	n/a	14,29 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	n/a	n/a	31,35 Persen	33,10 Persen	34,84 Persen	36,58 Persen	38,32 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Persen	n/a	n/a	16,67 Persen	23,33 Persen	25 Persen	31 Persen	33,33 Persen	34 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	41,36 Persen	41,36 Persen	42,42 Persen	44,16 Persen	45,87 Persen	46,86 Persen	50,07 Persen	50,07 Persen		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	n/a	99 Persen	99,81 Persen	99,82 Persen	99,83 Persen	99,84 Persen	99,85 Persen	99,85 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	n/a	96 Persen	96 Persen	96,1 Persen	96,2 Persen	96,3 Persen	96,4 Persen	96,4 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	n/a	99 Persen	99,5 Persen	99,6 Persen	99,7 Persen	99,8 Persen	99,9 Persen	99,9 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	n/a	99 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	n/a	n/a	16 Persen	36 Persen	56 Persen	77 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	n/a	25 Persen	33 Persen	41,67 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> (TFR))	Angka	1,67	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,62		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	n/a	n/a	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	82 Persen	82,5 Persen	83 Persen	84 Persen	84,5 Persen	85 Persen	85,5 Persen	85,5 Persen		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PERHUBUNGAN
	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen		DINAS PERHUBUNGAN
	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,39	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka		DINAS PERHUBUNGAN
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	43,4 Persen	50 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	74 Persen	74 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	28,57	28,57 Persen	42,86 Persen	57,14 Persen	71,43 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,67 Angka	2,67 Angka	2,75 Angka	2,85 Angka	2,9 Angka	2,95 Angka	2,95 Angka	2,95 Angka		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase UMKM yang berizin	Persen	78,11 Persen	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	70 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	55 persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	n/a	9,33 persen	10,67 persen	12 persen	13,33 persen	14,67 persen	17,33 persen	17,33 persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	0 Persen	0 Persen	14 Persen	28 Persen	40 Persen	50 Persen	70 Persen	70 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	0 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	67.55 Persen	66,88 Persen	70,23 Persen	73,58 Persen	75,25 Persen	76,92 Persen	78,59 Persen	78,59 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	60.12 Persen	56,54 Persen	59,52 Persen	63,99 Persen	65,48 Persen	66,96 Persen	68,45 Persen	68,45 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	59,2 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	13,38 persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	3,47 Persen	7,85 Persen	8,30 Persen	11,29 Persen	12,79 Persen	15,29 Persen	17,79 Persen	17,79 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	Jumlah prestasi Olahraga	medali	50 medali	n/a	55 medali	65 medali	80 medali	100 medali	130 medali	130 medali		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	n/a	n/a	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Organisasi Pramuka yang aktif	Organisasi	n/a	n/a	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi	18 Organisasi		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
14	URUSAN PEMERINTAHAN											

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BIDANG STATISTIK											
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	60 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	81 Persen	81 Persen		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	46 Persen	54 Persen	61,03 Persen	68,38 Persen	75,74 Persen	83,08 Persen	90,44 Persen	90,44 Persen		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	18 Pelestarian	46 Pelestarian	76 Pelestarian	104 Pelestarian	132 Pelestarian	132 Pelestarian		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	219 Pelestarian	454 Pelestarian	691 Pelestarian	953 Pelestarian	1215 Pelestarian	1215 Pelestarian		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
	Persentase perputakaan yang terakreditasi	Persen	4,94 Persen	7,61 Persen	10,08 Persen	12,55 Persen	14,02 Persen	17,48 Persen	19,95 Persen	19,95 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	58,9 Persen	59 Persen	60 Persen	61 Persen	62 Persen	63 Persen	64 Persen	64 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	67 Persen	68 Persen	69 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	73 Persen		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	n/a	n/a	0	20 Persen	60 Persen	80 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Produksi perikanan tangkap	Ton	829 Ton	829 ton	829 ton	831 ton	833 ton	835 ton	837 ton	837 ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.740 ton	12.740 ton	12.740 ton	12.805 ton	12.878 ton	12.959 ton	13.046 ton	13.046 ton		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	Cakupan Desa Wisata	Persen	n/a	32 Persen	33,33 Persen	34,67 Persen	36 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	93 Persen		DINAS PARIWISATA
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PARIWISATA
	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	n/a	n/a	2,71 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	15,19 Persen		DINAS PARIWISATA
	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	n/a	n/a	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	10 Persen		DINAS PARIWISATA
	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	n/a	n/a	n/a	25 Persen	35 Persen	50 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS PARIWISATA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah CBT	n/a	n/a	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT		DINAS PARIWISATA
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0 persen	100 Persen	0 persen	0 persen	0 persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Produksi Daging	Ton	15.222 Ton	15.326 Ton	15.456 Ton	15.588 Ton	15.713 ton	15.850 Ton	15.961 Ton	15.961 Ton		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,3 ton/ha	6,3 ton/ha	6,31 ton/ha	6,315 ton/ha	6,32 ton/ha	6,325 ton/ha	6,33 ton/ha	6,33 ton/ha		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
	-											
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6	URUSAN PEMERINTAHAN											

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BIDANG PERDAGANGAN											
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	67,09 persen	50 Persen	51 Persen	52 Persen	53 Persen	54 Persen	55 Persen	55 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi	Persen	0,5 persen	1 Persen	2 Persen	3 Persen	4 Persen	5 Persen	6 Persen	5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	10 persen	8 Persen	7 Persen	7 Persen	6 Persen	6 Persen	5 Persen	5 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Nilai ekspor	juta US\$	122 juta US\$	83 juta US\$	80 juta US\$	90 juta US\$	100 juta US\$	110 juta US\$	120 juta US\$	500 juta US\$		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	42,79%	25 Persen	27 Persen	30 Persen	32 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	0 Persen	0 Persen	-	10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	25 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0 Persen	81,5 Persen	85,97 Persen	90,65 Persen	95,32 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten	Persen	0.20 Persen	0 Persen	0 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
	Persentase Penempatan Transmigrasi	persen	0 Pesen	72 Persen	74 Persen	80 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
1	SEKRETARIAT DAERAH											

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85 Angka	85 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proporsional	Persen	n/a	0 Persen	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89,5 Persen	89,5 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	7,75 Persen	87,5 persen	88 persen	88,5 persen	89 persen	89,5 persen	90 persen	90 persen		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	n/a	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89,50 Persen	90 Persen	90 Persen		SEKRETARIAT DAERAH

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Persen	80 persen	80.5 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DEWAN											
	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	80 Persen	80 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen		SEKRETARIAT DPRD
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
1	PERENCANAAN											
	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Persen	10 persen	10 persen	10 Persen	20 Persen	50 Persen	70 Persen	90 persen	90 persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95,5 Persen	96 Persen	96,5 Persen	97 Persen	97 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	KEUANGAN											
	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	n/a	80 Persen	80 Persen	83 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	n/a	87,84 Persen	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	98,91 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi PAD	Persen	88,57 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
3	KEPEGAWAIAN											
	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	7 Persen	20 Persen	40 Persen	60 Persen	75 Persen	90 Persen	90 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	n/a	n/a	30 Persen	31 Persen	32 Persen	32 Persen	32 Persen	32 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Peta Kompetensi ASN	Persen	n/a	n/a	6 Persen	9 Persen	12 Persen	15 Persen	18 Persen	18 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
	INSPEKTORAT DAERAH											
	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	n/a	0	0	38,89 Persen	44,44 Persen	50 Persen	55,56 Persen	55,56 Persen		INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	n/a	n/a	12 Persen	13 Persen	14 Persen	15 Persen	16 Persen	16 Persen		INSPEKTORAT DAERAH
	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	n/a	n/a	20 Persen	25 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen		INSPEKTORAT DAERAH
G	UNSUR KEWILAYAHAN											

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KECAMATAN											
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON BANTUL
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	98 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON BANTUL
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANTUL

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	angka	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BAMBANGLIPURO
3	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	85 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON DLINGO
4	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON IMOGIRI

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON IMOGIRI
5	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON JETIS
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON JETIS
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON JETIS

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen		KAPANEWON JETIS
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON JETIS
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON JETIS
6	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	82 Persen	83 Persen	85 Persen	87 Persen	87 Persen		KAPANEWON KRETEK

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON KRETEK
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON KRETEK
7	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON KASIHAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON KASIHAN
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	n/a	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON KASIHAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen		KAPANEWON KASIHAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	n/a	90 Persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen		KAPANEWON KASIHAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON KASIHAN
8	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	82 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	82 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen		KAPANEWON PANDAK
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PANDAK

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen		KAPANEWON PUNDONG
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PUNDONG
10	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PLERET
11	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	95 Persen	96 Persen	96 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PIYUNGAN
12	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON PAJANGAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON PAJANGAN
13	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen		KAPANEWON SANDEN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen		KAPANEWON SANDEN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SANDEN
14	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SRANDAKAN
15	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEWON
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEWON
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEWON

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON SEDAYU
17	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	95 Persen	95 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	95 Persen	96 Persen	96 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		KAPANEWON BANGUNTAPAN
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	22,66 Persen	37,33 Persen	57,33 Persen	84 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	5 Persen	10,36 Persen	18 Persen	23 Persen	28 Persen	33 Persen	37 Persen	37 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Cakupan Lokasi yang di prakondisi	Persen	n/a	n/a	n/a	16,67 Persen	25 Persen	25 Persen	33 Persen	100 Persen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
III	Aspek Daya Saing											
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,43 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (BB)	82,00 (BB)	82,5 (BB)	83,25 (BB)	83,75 (BB)	83,75 (BB)	TUJUAN	Semua Perangkat Daerah
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315	IKU PEMDA	SEKRETARIAT DAERAH

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Persen	80,92	83	85	87	88	89	90	90	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	90	90	90	93	94	95	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH
	Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	90	85	85	85	85	90	90	90	IKU PD	SEKRETARIAT DAERAH

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	80	80	72	74	76	78	80	80	IKU PD	SEKRETARIAT DPRD
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	94,5	95	95	96	96	97	97	97	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	68,08	68,5	69	70	71	72	73	73	IKU PD	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	IKU PD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	persen	64,8	70	74	79	85	90	95	95	IKU PD	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Opini Laporan Keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU PEMDA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	n/a	n/a	6	5	5	4	4	4	IKU PD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	21.69	17	21.69	22.19	22.69	23.19	23.69	23.69	IKU PD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Nilai Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK</i>	Nilai	80,67	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5	IKU PEMDA	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	persen	91,5	92	82,5	83,5	84,5	85	85	85	IKU PD	INSPEKTORAT DAERAH
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3	3	3	3	IKU PD	INSPEKTORAT DAERAH
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45	IKU PEMDA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Index kualitas layanan informasi publik	Angka	83.03	80	83.75	84	84.25	84.5	84.75	84.75	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	n/a	n/a	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	7.8	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka	2.7	2.7	2.7	2.75	2.8	2.85	3	3	IKU PD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,03	88,03	88,1	88,4	88,8	89,1	89,5	89,5	IKU PEMDA	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAPANEWON
	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka	87.89	80.5	85.25	85.5	85.75	86	86.25	86.25	IKU PD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,63	91	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,85	IKU PD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga	n/a	3	4	6	8	10	12	12	IKU PD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	IKM Kapanewon	angka	95,5	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON BANTUL
	IKM Kapanewon	angka	95,73	95	95	95	95	95	95	95	IKU PD	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
	IKM Kapanewon	angka	95,54	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON DLINGO
	IKM Kapanewon	angka	91,11	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON IMOIRI
	IKM Kapanewon	angka	90	90	90	91	92	93	94	94	IKU PD	KAPANEWON JETIS
	IKM Kapanewon	angka	92	92	92	93	94	95	96	96	IKU PD	KAPANEWON KRETEK
	IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON KASIHAN
	IKM Kapanewon	angka	92,27	92,45	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON PANDAK
	IKM Kapanewon	angka	93	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON PUNDONG
	IKM Kapanewon	angka	95,82	90	90	91	92	93	94	94	IKU PD	KAPANEWON PLERET
	IKM Kapanewon	angka	90	90	92	93	94	95	95	95	IKU PD	KAPANEWON PIYUNGAN
	IKM Kapanewon	angka	95,78	90	94	94,5	95	95,5	96	96	IKU PD	KAPANEWON PAJANGAN
	IKM Kapanewon	angka	98,48	100	90	91	92	93	94	94	IKU PD	KAPANEWON SANDEN
	IKM Kapanewon	angka	92,58	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON SRANDAKAN
	IKM Kapanewon	angka	90,99	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON SEWON

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKM Kapanewon	angka	95,61	95	91	92	93	94	95	95	IKU PD	KAPANEWON SEDAYU
	IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	IKU PD	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	66,12	67,26	67,88	69,50	70,61	70,61	TUJUAN	DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD
	Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	73,71	75,05	76,40	77,47	79,08	79,08	IKU PEMDA	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	78.02	78.02	78.43	78.84	79.25	79.66	80.07	80.07	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	n/a	n/a	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,6	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80,01	80,01	80,37	80,73	81,09	81,45	81,81	81,81	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penduduk berakses air minum layak	Persen	82,36	82,36	83,56	84,38	85,19	85,98	86,76	86,76	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	84,83	84,83	87,86	90,89	93,92	96,95	100	100	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Penanganan kawasan kumuh	Persen	92,49	92,49	10,59	21,18	31,77	42,36	52,95	52,95	IKU PD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15	IKU PD	DINAS PERHUBUNGAN
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,01	80	75,03	75,05	75,07	75,1	75,2	75,2	IKU PEMDA	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	n/a	n/a	72	72,5	73	73,5	74	74	IKU PD	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	n/a	n/a	74	75	77	81	85	85	IKU PD	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,02	63,02	62,75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07	IKU PEMDA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,8	56	40	40,5	41	41,5	42	42	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,18	90	87	87,5	88	88,5	89	89	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2020	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (TAHUN 2021)	Target Kinerja					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (TAHUN 2026)	Keterangan	PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	54,82	61,2	57	59	61	63	65	65	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	n/a	n/a	83,33	76,67	75	69	66,67	66,67	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Capaian pengelolaan sampah	Persen	61,16	61,82	63,33	65,51	67,65	69,23	72,88	72,88	IKU PD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	187,2	181,26	175,51	169,94	164,55	159,33	154,27	154,27	IKU PEMDA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	IKU PD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	14,48	14,46	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	IKU PD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arah pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul periode tahun 2021-2026.

Selanjutnya dalam merencanakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, Perangkat Daerah wajib menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD.

Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan pencapaian visi jangka panjang, yaitu “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis” akan dapat terwujud pula.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- 2) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengendalian dan evaluasi didasarkan dari pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RKPD setiap tahun.
- 3) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026 kepada masyarakat.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

9.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul akan menyusun RKPD Tahun 2027 pada tahun 2026, yang merupakan tahun terakhir RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam hal pada tahun 2026 RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bantul pada periode berkenaan, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, Rancangan RKP Tahun 2027, program strategis nasional yang berlokasi di Bantul, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2027 yang diterbitkan oleh

Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

CASCADING

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR	
												2022	2023	2024	2025	2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berknerja tinggi dan akuntabel					Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,43 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (BB)	82,00 (BB)	82,5 (BB)	83,25 (BB)	83,75 (BB)	83,75 (BB)	Hasil penilaian KemenPAN RB atas laporan kinerja Pemerintah Daerah	Semua Perangkat Daerah	KEMENPAN RB	
								Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,4463	4,0815	4,1315	4,1815	4,2315	4,2815	4,3315	4,3315	Hasil penilaian Kemendagri atas laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH	KEMENDAGRI	
				Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Persen	80,92	83	85	87	88	89	90	90	Nilai AKIP yang dikeluarkan Kemenpan RB	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Fasilitas Kerjasama Daerah			Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Perikatan Kerjasama dikali 100%	SEKRETARIAT DAERAH		
					Peningkatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum			Persentase rancangan perda dan perkara yang diharmonisasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Rancangan Perda menjadi Perda dibagi Jumlah rancangan Perda yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Perda x 100%	SEKRETARIAT DAERAH		
					Pengaturan tata laksana perangkat daerah			Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah x 100	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	90	90	90	93	94	95	100	100	100	Jumlah perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B dibagi jumlah perangkat daerah yang dinilai x 100%	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam			Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti / jumlah kebijakan yang dihasilkan per tahun x 100%	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	90	85	85	85	85	85	90	90	90	Jumlah tingkat capaian seluruh program Setda dibagi jumlah program Setda	SEKRETARIAT DAERAH	
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85 Angka	85 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	83 Angka	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
								Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dibagi Jumlah dokumen perencanaan dan laporan keuangan Sekretariat Daerah yang dihasilkan x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
								Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	
							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	92 Persen	Jumlah data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang harus disediakan x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
								Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Rancangan Perda menjadi Perda dibagi Jumlah rancangan Perda yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Perda x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	
								Persentase Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
							PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjut	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kebijakan Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kebijakan Perekonomian dan SDA yang dihasilkan x 100%	SEKRETRIAT DAERAH - BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SDA	
								Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender	Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Nilai realisasi pengadaan dengan metode tender dibagi nilai rencana pengadaan dengan metode tender x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
								Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proporsional	Persen	n/a	0 Persen	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89,5 Persen	89,5 Persen	89,5 Persen	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional dibagi Jumlah perangkat daerah x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
								Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kabupaten pada urusan keistimewaan	Persen	7,75 Persen	87,5 persen	88 persen	88,5 persen	89 persen	89,5 persen	90 persen	90 persen	90 persen	Jumlah kelembagaan perangkat daerah dan Kabupaten pada urusan keistimewaan dibagi Jumlah kelembagaan perangkat daerah dan Kabupaten x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN HUKUM	
								Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	n/a	87,5 Persen	88 Persen	88,5 Persen	89 Persen	89,50 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang proporsional dibagi Jumlah perangkat daerah x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIA di PD Kabupaten Bantul	Persen	80 persen	80,5 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan budaya pemerintahan SATRIA dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ORGANISASI	
				Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk hukum	Penataan kebijakan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD		Persentase Raperda yang Disetujui Bersama	Persen	80	80	72	74	76	78	80	80	80	Jumlah Raperda yang Disetujui Bersama Tahun N / Jumlah Target Raperda Tahun N x 100%	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
							PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	80 Persen	80 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Jumlah Raperda yang dibahas bersama Tahun N / Jumlah Target Raperda Tahun N x 100%	SEKRETARIAT DPRD	
				Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah program RKPD dengan RPJMD yang sesuai dibagi jumlah program di RPJMD x 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	94,5	95	95	96	96	97	97	97	97	Jumlah indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan Sangat Tinggi dibagi jumlah indikator sasaran RPJMD x 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
								Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Persen	10 persen	10 persen	10 persen	20 Persen	50 Persen	70 Persen	90 persen	90 persen	90 persen	Rata-rata persentase luas zona inti terkonservasi dibagi luas zona inti per Geoheritage	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah pernyataan evaluasi kebijakan RKPD yang sesuai dibagi jumlah pernyataan evaluasi kebijakan RKPD yang diamanatkan peraturan Mendagri x 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
								Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95,5 Persen	96 Persen	96,5 Persen	97 Persen	97 Persen	97 Persen	Jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi dibagi jumlah indikator sasaran Renstra perangkat daerah x 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
								Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sub-kegiatan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR		
												2022	2023	2024	2025					2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rencana PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sub kegiatan PD bidang perekonomian dan SDA dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang perekonomian dan SDA kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
								Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rencana PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sub kegiatan PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibagi sub kegiatan PD pada renstra bidang infrastruktur dan kewilayahan kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
				Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur	Peningkatan dan pemenuhan kualitas/kompetensi sumber daya aparatur	Meningkatnya profesionalisme ASN		Capaian Indeks Profesionalitas ASN	nilai	68,08	68,5	69	70	71	72	73	73	Hasil Penilaian BKN atas Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bantul	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	BKN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	7 Persen	20 Persen	40 Persen	60 Persen	75 Persen	90 Persen	90 Persen	Jumlah ASN yang mendapatkan internalisasi Keistimewaan dibagi jumlah seluruh ASN (jabatan administrator dan pegawai) dikali 100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
							PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	n/a	n/a	30 Persen	31 Persen	32 Persen	32 Persen	32 Persen	32 Persen	Jumlah tambahan formasi yang disetujui Menpan dibagi jumlah kekurangan kebutuhan formasi dikali 100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
								Peta Kompetensi ASN	Persen	n/a	n/a	6 Persen	9 Persen	12 Persen	15 Persen	18 Persen	18 Persen	Jumlah aparatur yang sudah dinilai kompetensinya dibagi jumlah total ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
								Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah pelanggaran yang tertangani dibagi pelanggaran disiplin dikali 100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
				Mengoptimalkan pengembangan penelitian dan penelitian serta inovasi daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dibagi Seluruh hasil penelitian dan pengembangan kali 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA dibagi jumlah hasil penelitian dan pengembangan x 100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan	Peningkatan tata kelola kearsipan	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar		Cakupan PD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	Persen	64,8	70	74	79	85	90	95	95	95	Jumlah PD yang telah melaksanakan tata kelola kearsipan dengan nilai baik dibagi jumlah PD kali 100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	58,9 Persen	59 Persen	60 Persen	61 Persen	62 Persen	63 Persen	64 Persen	64 Persen	64 Persen	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan ketuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	67 Persen	68 Persen	69 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	73 Persen	73 Persen	$T = (m + b + g + a + c + j) / 6$ T = tingkat keberadaan dan ketuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan / atau dibubarkan dan pekerasan Daerah Kabupaten dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK j = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berknerja tinggi dan akuntabel					Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BPK	
				Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan tata kelola keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah		Berkurangnya Catatan Hasi Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	n/a	n/a	6	5	5	4	4	4	4	Jumlah catatan hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	n/a	80 Persen	80 Persen	83 Persen	85 Persen	88 Persen	90 Persen	90 Persen	(Realisasi Belanja per Tahapan dibagi Anggaran Kas per Tahapan) x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
							PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Penetapan Rancangan Perda APBD 1. Tepat Waktu (100 %) 2. Tidak Tepat Waktu (50 %)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
								Penyampaian raperd pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1. Tepat Waktu (100 %) 2. Tidak Tepat Waktu (50 %)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
								Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Persen	n/a	87,84 Persen	89 Persen	89 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	91 Persen	(Realisasi Belanja Daerah dibagi anggaran belanja daerah) x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
							PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	98,91 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah aset usaudit dibagi jumlah aset hasil audit x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
								Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	21,69	17	21,69	22,19	22,69	23,19	23,69	23,69	23,69	PAD dibagi Jumlah pendapatan daerah dikali 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	Persen	88,57 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Realisasi PAD dibagi Target PAD) x 100%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berknerja tinggi dan akuntabel					Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP)</i> KPK	Nilai	80,67	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5	84,5	Hasil Monitoring dari 8 area intervensi yang dilakukan KPK	INSPEKTORAT DAERAH	KPK
				Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Persen	91,5	92	82,5	83,5	84,5	85	85	85	85	Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten dibagi seluruh LHP BPK dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	
								Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3	3	3	3	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai 0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	INSPEKTORAT DAERAH		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	n/a	0	0	38,89 Persen	44,44 Persen	50 Persen	55,56 Persen	55,56 Persen	55,56 Persen	Jumlah PD pelaksana Danais yang telah menindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat dibagi seluruh PD pelaksana Danais dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketetapan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Persen	n/a	n/a	12 Persen	13 Persen	14 Persen	15 Persen	16 Persen	16 Persen	16 Persen	Peningkatan PD yang taat terhadap peraturan yang berlaku dibagi seluruh PD dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PERUMUSAN KEBLIKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	n/a	n/a	20 Persen	25 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen	PD yang menerapkan Manajemen Resiko dibagi seluruh PD dikali 100%	INSPEKTORAT DAERAH	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks		3,24	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEMENPAN RB
				Memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Index kualitas layanan informasi publik	Angka		83,03	80	83,75	84	84,25	84,5	84,75	84,75	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Peningkatan pemenuhan sarana prasarana informasi dan komunikasi															
							PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	43,4 Persen	50 Persen	70 Persen	71 Persen	72 Persen	73 Persen	74 Persen	74 Persen	(Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten) dibagi (Jumlah Penduduk)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
					Peningkatan pengamanan informasi	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka		n/a	n/a	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8	Survey Indeks Pembangunan TIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Persen	28,57	28,57 Persen	42,86 Persen	57,14 Persen	71,43 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	Kawasan SES dan budaya dengan jaringan informasi digital dibagi jumlah kawasan SRS dikali 100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							Nilai Taimodel Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	angka		2,7	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3	3	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,67 Angka	2,67 Angka	2,75 Angka	2,85 Angka	2,9 Angka	2,95 Angka	2,95 Angka	2,95 Angka	Hasil penilaian Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
								Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo) dibagi (Jumlah PD)*100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100 persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) dibagi (Jumlah PD)*100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat kesamanan informasi pemerintah	Persen	60 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	81 Persen	81 Persen	(Jumlah nilai per area kesamanan informasi) dibagi (Jumlah area penilaian)*100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	88,03	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	Nilai rata-rata SKM perangkat daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KAPANEWON	BAGIAN ORGANISASI
				Meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat	Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perijinan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	IKM Kinerja PTSP	nilai/angka		87,89	80,5	85,25	85,5	85,75	86	86,25	86,25	Nilai SKM perangkat daerah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
								Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,63	91	99,81	99,82	99,83	99,84	99,85	99,85	Jumlah Persentase kepemilikan dokumen adminduk (Kepemilikan KK, KTPel, KIA, Akte Kelahiran 0-18tan dan Akte Kematian) / 5 Jenis Dokumen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
					Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	Lembaga		n/a	3	4	6	8	10	12	12	Jumlah PD yang menggunakan hak akses	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	n/a	99 Persen	99,81 Persen	99,82 Persen	99,83 Persen	99,84 Persen	99,85 Persen	99,85 Persen	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan/ jumlah penduduk x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	n/a	96 Persen	96 Persen	96,1 Persen	96,2 Persen	96,3 Persen	96,4 Persen	96,4 Persen	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan / 4 jenis dokumen x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	n/a	99 Persen	99,5 Persen	99,6 Persen	99,7 Persen	99,8 Persen	99,9 Persen	99,9 Persen	Jumlah Data Anomali atau ganda dibagi jumlah data adminduk x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat	Persen	n/a	99 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah buku profil yang disebar / jumlah buku profil yang diterbitkan x 100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
								IKM Kapanewon	angka	95,5	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Bantul	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON BANTUL	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kelurahan	KAPANEWON BANTUL	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	98 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON BANTUL	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2	KAPANEWON BANTUL	
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	KAPANEWON BANTUL	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON BANTUL	
								IKM Kapanewon	angka	95,73	95	95	95	95	95	95	95	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Bambanglipuro	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kelurahan	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR	
												2022	2023	2024	2025	2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	{(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2}	KAPANEWON BAMBANGLIPURO		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	{(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum}*100%	KAPANEWON BAMBANGLIPURO		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,54	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Dlingo		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON DLINGO		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON DLINGO		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON DLINGO		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	85 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	{(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2}	KAPANEWON DLINGO		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	{(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum}*100%	KAPANEWON DLINGO		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON DLINGO		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	91,11	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Imogiri		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON IMOIRI		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON IMOIRI		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON IMOIRI		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	{(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2}	KAPANEWON IMOIRI		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	{(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum}*100%	KAPANEWON IMOIRI		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON IMOIRI		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	90	91	92	93	94	94	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Jetis		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON JETIS		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON JETIS		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON JETIS		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	{(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2}	KAPANEWON JETIS		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	{(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum}*100%	KAPANEWON JETIS		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON JETIS		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	92	92	92	93	94	95	96	96	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Kretak		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON KRETEK		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON KRETEK		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON KRETEK		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	82 Persen	83 Persen	85 Persen	87 Persen	87 Persen	{(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2}	KAPANEWON KRETEK		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	92 Persen	92 Persen	{(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum}*100%	KAPANEWON KRETEK		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON KRETEK		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Kasihan		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON KASHIHAN		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON KASHIHAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON KASHIHAN		

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR	
												2022	2023	2024	2025	2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	93 Persen	{(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2}	KAPANEWON KASHIHAN		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	93 Persen	{(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum}*100%	KAPANEWON KASHIHAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON KASHIHAN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	92,27	92,45	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pandak		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PANDAK		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PANDAK		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON PANDAK		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	82 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	{(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2}	KAPANEWON PANDAK		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	82 Persen	82 Persen	84 Persen	86 Persen	88 Persen	88 Persen	88 Persen	{(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum}*100%	KAPANEWON PANDAK		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PANDAK		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	93	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pundong		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PUNDONG		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PUNDONG		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 persen	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	95 persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON PUNDONG		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	80 persen	82 persen	83 persen	85 persen	86 persen	86 persen	{(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2}	KAPANEWON PUNDONG		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	{(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum}*100%	KAPANEWON PUNDONG		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PUNDONG		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,82	90	90	90	91	92	93	94	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pleret		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PLERET		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PLERET		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON PLERET		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	{(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2}	KAPANEWON PLERET		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	90 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	{(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum}*100%	KAPANEWON PLERET		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PLERET		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	92	93	94	95	95	95	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Piyungan		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PIYUNGAN		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PIYUNGAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	95 Persen	96 Persen	96 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON PIYUNGAN		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	{(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2}	KAPANEWON PIYUNGAN		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	{(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum}*100%	KAPANEWON PIYUNGAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PIYUNGAN		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,78	90	94	94,5	95	95,5	96	96	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Pajangan		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON PAJANGAN		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON PAJANGAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON PAJANGAN		

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR	
												2022	2023	2024	2025	2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2	KAPANEWON PAJANGAN		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum*100%	KAPANEWON PAJANGAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON PAJANGAN	
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	98,48	100	90	91	92	93	94	94	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Sanden		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SANDEAN		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SANDEAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON SANDEAN		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	84 Persen	(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2	KAPANEWON SANDEAN		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	91 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum*100%	KAPANEWON SANDEAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SANDEAN		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	92,58	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Srandakan		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SRANDAKAN		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SRANDAKAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON SRANDAKAN		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2	KAPANEWON SRANDAKAN		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	95 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum*100%	KAPANEWON SRANDAKAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SRANDAKAN		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90,99	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Sewon		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SEWON		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SEWON		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON SEWON		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	90 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	92 Persen	(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2	KAPANEWON SEWON		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum*100%	KAPANEWON SEWON		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SEWON		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	95,61	95	91	92	93	94	95	95	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Sedayu		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON SEDAYU		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON SEDAYU		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	100 Persen	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	94 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON SEDAYU		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2	KAPANEWON SEDAYU		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum*100%	KAPANEWON SEDAYU		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON SEDAYU		
						Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat		IKM Kapanewon	angka	90	90	90	90	91	91	92	92	Nilai SKM perangkat daerah	Kapanewon Banguntapan		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	KAPANEWON BANGUNTAPAN		
								Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	n/a	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	KAPANEWON BANGUNTAPAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	n/a	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	95 Persen	95 Persen	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	KAPANEWON BANGUNTAPAN		

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR	
												2022	2023	2024	2025	2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	n/a	100 Persen	92 Persen	93 Persen	94 Persen	95 Persen	96 Persen	96 Persen	(Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)/2	KAPANEWON BANGUNTAPAN		
							PROGRAM KOORDINASI KETENTAMAN DAN KETERTIBAN KAPANEWON	Cakupan Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	n/a	100 Persen	95 Persen	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	98 Persen	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum*100%	KAPANEWON BANGUNTAPAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan wilayah pelayanan	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, Berkarakter dan Berbudaya Istimewa	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya						Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,01	80,02	80,63	81,09	81,54	81,99	82,44	82,44	IPM = 1/3 [X1] + X2] + X3]] Dimana: X1] : Indeks harapan hidup X2] : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf] + 1/3(indeks rata-rata lama sekolah) X3] : Indeks standar hidup layak	DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS DIKPORA	BPS BANTUL	
			Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi					Umur Harapan Hidup	Tahun	73,86	73,90	74,01	74,11	74,20	74,29	74,39	74,39	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	DINKES RSUD UPTD PUSKESMAS	BPS BANTUL	
				Mengajukan sistem kesehatan	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	Menurunnya angka kematian		Net Death Rate (NDR)	permil	21,7	21,7	21,5	21	20,5	20	19,5	19,5	Angka kematian pasien > 48 jam setelah di rawat di rumah sakit setiap 1000 pasien keluar.	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	Angka	82,38 angka	85 angka	82,15 angka	82,50 angka	82,90 angka	83,10 angka	83,50 angka	83,50 angka	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI		
								Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	77,50 Persen	77,50 Persen	80 Persen	80,50 Persen	81 Persen	81,50 Persen	82 Persen	82 Persen	Infilator SPM rumah sakit yang tercapai dibagi seluruh indikator SPM rumah sakit x 100%	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI		
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Bed Occupation Rate (BOR)	persen	57,29 Persen	57,29 Persen	65 Persen	67 Persen	69 Persen	71 Persen	73 Persen	73 Persen	Jumlah hari perawatan dibagi (jumlah tempat tidur dikali 365 hari) dikali 100%	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI		
								Turn Over Interval (TOI)	hari	2,69 hari	2,69 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	(Jumlah tempat tidur x 365 hari)-Jumlah Pasien yang Keluar/dibagi Jumlah Pasien yang Keluar	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI		
								Bed Turn Over (BTO)	kali	46,29 kali	46,29 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	Jumlah pasien keluar (hidup dan mati) dibagi Jumlah Tempat Tidur	RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI		
				Mengajukan sistem kesehatan	Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan		Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	157	85	88,7	80,7	72,6	64,5	56,5	56,5	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas selama 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup x100.000	DINAS KESEHATAN		
				Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan			Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	6,93	8	7,7	7,3	6,9	6,5	6,3	6,3	Jumlah kematian bayi dalam satu tahun dibagi jumlah lahir hidup kali 1000	DINAS KESEHATAN		
								Case Fatality Rate Covid 19	Persen	2,8	2,75	2,75	2,5	2,25	2	1,75	1,75	Jumlah kematian karena covid 19 dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah penderita covid 19 dalam kurun waktu yang sama dikali 100%	DINAS KESEHATAN		
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	Indeks komposit yang dihitung dari : Indeks Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP ditambah Indeks Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dengan perhitungan : (50% x capaian indeks fasilitas pelayanan kesehatan) + (50% x capaian indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP)	DINAS KESEHATAN		
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makan minum sesuai standar dibagi dengan yang diawasi.	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	Indeks komposit yang di hitung dari : (20 % x capaian pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) + (20% x capaian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga] + (20% x Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)] + (20% x Penerbitan Siker Pembinaan pada Makanan, Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan) + (20% x Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga)	DINAS KESEHATAN		
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesmas	Persen	100 Persen	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah orang yang mendapat pendampingan pembiayaan kesehatan dibagi dengan jumlah orang yg mengajukan pendampingan pembiayaan kesehatan dikali 100%	UPTD JAMKESDA		
							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda	Persen	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah orang yang mendapat pelayanan laboratorium kesehatan dibagi dengan jumlah orang yg mengajukan pelayanan laboratorium kesehatan dikali 100%	UPTD LABKESDA		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD	angka	83,92 angka	83,95 angka	84 angka	84,15 angka	84,30 angka	84,40 angka	84,50 angka	84,50 angka	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	27 PUSKESMAS		
								Cakupan Pelayanan Puskesmas	persen	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jumlah pelayanan yang dilakukan di Puskesmas dibagi (5 layanan UKM dan 4 Layanan UKM) dikali 100%	27 PUSKESMAS		
				Meningkatkan kesadaran perilaku hidup sehat masyarakat	Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat	Meningkatnya pembudayaan masyarakat sehat		Insiden Rate DBD	per 100.000 penduduk	128	125	125	120	115	110	105	105	Jumlah orang yang sakit DBD dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk x 100.000	DINAS KESEHATAN		
					Optimalisasi peran posyandu untuk layanan Kesehatan			Prevalensi stunting	Persen	9,74	9	9	8,5	8	7,5	7	7	Jumlah balita dengan status gizi pendek dan sangat pendek dibagi total jumlah balita dalam kurun waktu 1 tahun dikali 100%	DINAS KESEHATAN		
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Indeks	n/a	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	1 indeks	Indeks komposit yang dihitung dari : (50% x Persentase pemenuhan SDMK) + (50% x Persentase SDMK memiliki STR)	DINAS KESEHATAN		
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Purnama Mandiri	Kalurahan	36 Kalurahan	36 Kalurahan	40 Kalurahan	45 Kalurahan	50 Kalurahan	55 Kalurahan	60 Kalurahan	60 Kalurahan	Desa Siaga Purnama Mandiri	DINAS KESEHATAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Persen	18,5 Persen	25,93 Persen	33 Persen	40 Persen	48 Persen	55 Persen	62 Persen	62,9 Persen	Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) terintegrasi / seluruh Puskesmas * 100%	DINAS KESEHATAN		

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah					Desa /Kurahan Pamor Budaya	Kurahan	1	3	4	6	8	10	12	12	Jumlah Desa/Kurahan yang memiliki 4 pedikad sekaligus (sebagai Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Preneur dan Desa Prima)	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDDHA KABUDAYAN) didukung oleh : DINAS PARIWISATA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPANIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDDHA KABUDAYAN)
				Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa Pembangunan prasarana pengembangan kebudayaan Pemasyratkan tata nilai budaya istimewa Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan	Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah		Rintisan Desa/Kurahan Budaya	Kurahan	9	12	15	18	21	24	27	27	Jumlah Desa/Kurahan yang ditetapkan sebagai Rintisan Desa / Kalurahan Budaya	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDDHA KABUDAYAN)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	46 Persen	54 Persen	61,03 Persen	68,38 Persen	75,74 Persen	83,08 Persen	90,44 Persen	90,44 Persen	Jumlah Warisan Budaya Benda yang ditetapkan dibagi Jumlah Warisan Budaya Benda yang Terdata dikali 100%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDDHA KABUDAYAN)	
								Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	18 Pelestarian	46 Pelestarian	76 Pelestarian	104 Pelestarian	132 Pelestarian	132 Pelestarian	Jumlah Pelestarian Bahasa Sastra tahun N	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDDHA KABUDAYAN)	
								Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	n/a	n/a	219 Pelestarian	454 Pelestarian	691 Pelestarian	953 Pelestarian	1215 Pelestarian	1215 Pelestarian	Jumlah Pelestarian Seni, Adat Tradisi tahun N	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDDHA KABUDAYAN)	
		Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya						Indeks Rasa Aman	Indeks	n/a	n/a	2,70	2,73	2,76	2,79	2,81	2,81	Survey masyarakat oleh lembaga independen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	LEMBAGA INDEPENDEN
			Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis					Persentase penanganan gangguan ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	Penanganan gangguan tranribummas yg di tangani di bagi pengaduan tranribummas yg di selesaikan di kali 100 persen	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan penegakan perda Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan munculnya gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum masyarakat		Persentase gangguan tranribum yang dapat di selesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	(Jumlah pengaduan yang ditangani) / (Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk)*100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	70 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah Perda / Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan) / (Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi)*100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	n/a	27,22 Persen	29,37 Persen	45,44 Persen	66,88 Persen	88,31 Persen	100 Persen	100 Persen	Kelompok jagawarga di pedukuhan yang ditetapkan dibagi seluruh pedukuhan dikali 100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				Mengusatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan		Persentase Pemilih yang berpartisipasi	Persen	80,32	75	75	77	77	78	78	78	jumlah pengguna hak pilih dibagi jumlah Daftar Pemilih Tetap x 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Kalurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	22,66 Persen	37,33 Persen	57,33 Persen	84 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan berdemokrasi /Jumlah desa se Kabupaten Bantul x 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				Mengusatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	Meningkatnya kondusifitas masyarakat		Jumlah intoleransi di masyarakat	Angka	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah kasus intoleransi di masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan /jumlah sekolahx 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	5 Persen	10,36 Persen	18 Persen	23 Persen	28 Persen	33 Persen	37 Persen	37 Persen	Jumlah ormas yang dibina/jumlah ormasx 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan Antar Umat Beragama	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	FKUB Aktif //FKUB se Kab. Bantul x 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				Mengusatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat	Meningkatnya kondusifitas masyarakat		Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	Jumlah kejadian	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD dibagi permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD dikali 100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang di prakondisi	Persen	n/a	n/a	n/a	16,67 Persen	25 Persen	25 Persen	33 Persen	100 Persen	Jumlah Lokasi yang diprakondisi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas						Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,66	3,12	3,80	3,97	4,48	4,83	5,12	5,12	Pertumbuhan PDRB PDRB(t+1) - PDRB(t) x 100% Dimana: t+1= tahun pengamatan PDRB t= tahun pengamatan PDRB sebelumnya	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN	BPS BANTUL
			Terwujudnya pemerataan pendapatan					Rasio Gini	Angka	0,381	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310	$G = 1 - 4 P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: P _i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q _i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3= ketimpangan rendah 0,3 ≤ G < 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5= ketimpangan tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA DINAS KUKMP PERDAGANGAN	BPS BANTUL
				Meningkatkan pola konsumsi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Meningkatnya kualitas pangan masyarakat		Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	91,4	91,4	90,4	90,8	91	91,2	91,2	91,2	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Persen	30,67 Persen	30,67 Persen	37,33 Persen	42,67 Persen	48 Persen	53,33 Persen	58,67 Persen	58,67 Persen	Desa Mandiri Pangan yang ditetapkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR		
												2022	2023	2024	2025						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	n/a	n/a	14,28 Persen	28,57 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah lumbung pangan yang operasional dibagi total lumbung dikali 100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
							PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	144,57 Persen	147,57 Persen	149 Persen	151 Persen	153 Persen	155 Persen	157 Persen	157 Persen	(Jumlah cadangan pangan) / (Jumlah kebutuhan pangan)*100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	n/a	24 Persen	22,67 Persen	21,33 Persen	20 Persen	18,67 Persen	17,33 Persen	17,33 Persen	Jumlah desa rentan rawan pangan dibagi Jumlah total desa dikali 100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang aman dibagi jumlah sampel yang diuji dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan perlindungan lahan dan ketersediaan air Peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian Peningkatan kualitas dan kesehatan ternak Penguatan pemberdayaan kelembagaan pertanian Pengembangan Agribisnis dan Agrowisata	Meningkatnya produksi pertanian		Pertumbuhan produksi sektor pertanian	Persen	0,712	0,712	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	Rata - rata pertumbuhan produksi pertanian (Pertumbuhan produksi tanaman pangan, pertumbuhan produksi tanaman hortikultura, pertumbuhan produksi tanaman perkebunan, pertumbuhan produksi daging dan pertumbuhan produksi telur) tahun n	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0 persen	100 Persen	0 persen	0 persen	0 persen	0 persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sarana pertanian yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana pertanian dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah sarana peternakan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan sarana peternakan dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan dibagi jumlah prasarana pertanian yang tersedia dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah bibit ternak yang diberikan fasilitas perlindungan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWANI DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah kejadian penyakit / kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)) dibagi (Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1))*100%	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produksi Daging	Ton	15.222 Ton	15.326 Ton	15.456 Ton	15.588 Ton	15.713 ton	15.850 Ton	15.961 Ton	15.961 Ton	Jumlah daging sapi, kambing, itik dan ayam	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
							PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah kejadian yang difasilitasi dibagi jumlah bencana dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan dibagi jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dikalikan 100 %	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
							PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	6,3 ton/ha	6,3 ton/ha	6,31 ton/ha	6,315 ton/ha	6,32 ton/ha	6,325 ton/ha	6,33 ton/ha	6,33 ton/ha	6,33 ton/ha	(Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun)	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
				Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan	Peningkatan produksi perikanan Peningkatan nilai tambah perikanan Peningkatan pengawasan dan pengendalian	Terpenuhiya kebutuhan perikanan masyarakat		Pertumbuhan produksi sektor perikanan	Persen	1,59	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65	Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun ini dikurangi Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dibagi (Jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) tahun dasar dikali 100%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	n/a	n/a	0	20 Persen	60 Persen	80 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Kalurahan bahari yang direvitalisasi dibagi jumlah kalurahan bahari dikali 100%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	829 Ton	829 ton	829 ton	831 ton	833 ton	835 ton	837 ton	837 ton	837 ton	Jumlah Produksi perikanan tangkap	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	12.740 ton	12.740 ton	12.740 ton	12.805 ton	12.878 ton	12.959 ton	13.046 ton	13.046 ton	13.046 ton	Jumlah produksi perikanan budidaya	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Jumlah pelanggaran aturan tahun n dikurangi jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dibagi Jumlah pelanggaran aturan tahun n-1 dikalikan 100 %	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	Jumlah hasil produksi perikanan yang diolah/Total Jumlah produksi ikan dibagi jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya dikalikan 100%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Mengembangkan Pariwisata berbasis masyarakat	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Peningkatan Promosi dan Kerjasama pariwisata Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata	Meningkatnya kualitas pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	2.348.313	1.870.000	2.057.000	2.262.700	2.488.970	2.737.867	3.011.654	3.011.654	Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun ke n	DINAS PARIWISATA		
								Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,56	1	1,25	1,50	1,75	2,00	2,10	2,10	2,10	Rata-rata lama kunjungan wisata dalam satu tahun	DINAS PARIWISATA	
								Jumlah Belanja Wisatawan	Rupiah/org	675.000	708.750	744.188	781.397	820.467	861.490	904.565	904.565	904.565	Rata-rata belanja wisatawan saat berkunjung	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Desa Wisata	Persen	n/a	32 Persen	33,33 Persen	34,67 Persen	36 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	39,33 Persen	39,33 Persen	Desa wisata yang ditetapkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100%	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasulanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Persen	n/a	n/a	2,71 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	3,13 Persen	Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana di destinasi wisata baru dibagi total destinasi wisata dikali 100%	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	n/a	n/a	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	Jumlah Wisatawan Tahun n dikurangi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 Dibagi Jumlah Wisatawan Tahun n-1 dikali seratus persen	DINAS PARIWISATA	
				Melindungi produk lokal dan mengembangkan jaringan pemasaran	Modernisasi pasar tradisional	Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB		Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Rupiah (Miliar)	1576,54	1.725,60	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	2.038,40	2.038,40	2.038,40	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n (sumber data BPS)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	67,09 persen	50 Persen	51 Persen	52 Persen	53 Persen	54 Persen	55 Persen	55 Persen	55 Persen	(Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan) / (Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten)*100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dimodernisasi	Persen	0,5 persen	1 Persen	2 Persen	3 Persen	4 Persen	5 Persen	6 Persen	5 Persen	5 Persen	(Jumlah omzet pedagang di lokasi pasar 't' yang telah mendapatkan fasilitas pengembangan/pengelolaan dikurangi omzet pedagang di lokasi pasar 'y' sebelum dilakukan pengembangan) dibagi (omzet pedagang di lokasi pasar 'y' sebelum dilakukan pengembangan) x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Persen	10 persen	8 Persen	7 Persen	7 Persen	6 Persen	6 Persen	5 Persen	5 Persen	Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok yang sudah dibalikkan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot untuk hapok (Beras, Jagung, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US\$	122 juta US\$	83 juta US\$	80 juta US\$	90 juta US\$	100 juta US\$	110 juta US\$	120 juta US\$	500 juta US\$	Nilai ekspor Kabupaten Bantul menurut jenis komoditas pada tahun n (sumber data Diaperindag DIY)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbangan, dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	42,79%	25 Persen	27 Persen	30 Persen	32 Persen	35 Persen	40 Persen	40 Persen	(Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan) / (Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten)*100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persen	0 Persen	0 Persen	-	10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	25 Persen	(Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri - Jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri) x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas perkoperasian	Meningkatnya koperasi yang berkualitas		Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	persen	n/a	1,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	16,5	Jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 / jumlah koperasi aktif tahun n x 100% Koperasi yang berkualitas = Koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	0 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	2,5 Persen	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun n / jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	67,55 Persen	66,88 Persen	70,23 Persen	73,58 Persen	75,25 Persen	76,92 Persen	78,59 Persen	78,59 Persen	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi / jumlah koperasi aktif x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	60,12 Persen	56,54 Persen	59,52 Persen	63,99 Persen	65,48 Persen	66,96 Persen	68,45 Persen	68,45 Persen	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya / jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHIAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	59,2 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah koperasi aktif x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	13,38 persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan akses kemitraan dibagi jumlah koperasi aktif x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Memperudah investasi dalam berbagai bidang.	Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya nilai investasi		Nilai Realisasi Investasi	Rupiah (Miliar)	1.594,75	1.684,64	1.824,47	2.030,54	2.290,35	2.640,66	3.110,56	3.110,56	Nilai Investasi PMDN + PMA sampai dengan tahun n	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian kinerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	3,47 Persen	7,85 Persen	8,30 Persen	11,29 Persen	12,79 Persen	15,29 Persen	17,79 Persen	17,79 Persen	(Jumlah investasi thn n - Jumlah investasi tahun-1) di kabupaten) / (Jumlah investasi di tahun n - 1 di Kabupaten)*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Realisasi pelaksanaan subkegiatan/target pelaksanaan*100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Terwujudnya pemerataan pendapatan					Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,06	4,06	3,90	3,50	3,40	3,30	3,20	3,20	Jumlah penganggur terbuka usis angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja x100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	BPS BANTUL
				Menyediakan tenaga kerja yang kompetitif	Peningkatan kompetensi tenaga kerja Penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar Peningkatan kerjasama dengan perusahaan	Meningkatnya serapan tenaga kerja		Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	5000	6500	7500	8500	9500	10500	11500	11500	Jumlah tenaga kerja yang terserap	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	17,5 Persen	18,5 Persen	18,5 Persen	19,5 Persen	20,5 Persen	21,5 Persen	22,5 Persen	22,5 Persen	(Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi) / (Jumlah tenaga kerja keseluruhan)*100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	52 Persen	54 Persen	54 Persen	56 Persen	58 Persen	60 Persen	62 Persen	62 Persen	(Jumlah pencari kerja yang ditempatkan) / (Jumlah pencari kerja terdaftar)*100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	32 Persen	35 Persen	35 Persen	36 Persen	37 Persen	38 Persen	39 Persen	39 Persen	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak) / (Jumlah Perusahaan)*100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
							PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	0 Persen	72 Persen	74 Persen	80 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(jumlah kk ditempatkan / jumlah kuota x100%)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Pengembangan Potensi Desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa Pengelolaan dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri		Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	25	27	33	43	53	63	73	73	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kalurahan Sasaran Penataan Kalurahan, dibagi jumlah seluruh Kalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar kalurahan dibagi Pelaksanaan Kerjasama Antar Kalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kalurahan yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Kalurahan dengan baik dibagi jumlah seluruh Kalurahan, dikali 100 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Persen	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah kelompok binaan LPM dibagi Jumlah LPM dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBLAKAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR	
												2022	2023	2024	2025					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.	Persen	n/a	n/a	16 Persen	36 Persen	56 Persen	77 Persen	100 Persen	100 Persen	Kalurahan yang dilakukan inventarisasi tanah kalurahan dibagi seluruh kalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Persen	n/a	25 Persen	33 Persen	41,67 Persen	50 Persen	58,33 Persen	66,67 Persen	66,67 Persen	Kalurahan yang melaksanakan urusan keistimewaan kelembagaan berdasarkan Peraturan bupati Kewenangan Kalurahan dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
			Terwujudnya pemerataan pendapatan					Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Persen	n/a	n/a	80	90	100	100	100	100	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif (capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif dibagi total komponen dikali 100%)	DINAS PARIWISATA	Indonesia Creative Cities Network (ICCN) atau Jejaring Kota/Kabupaten Kreatif Indonesia
				Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan dan pengembangan sumberdaya ekonomi kreatif	Meningkatnya jaringan ekonomi kreatif		Jumlah parameter Kabupaten Kreatif yang dipenuhi	jumlah parameter	n/a	n/a	14	16	18	18	18	18	Capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	n/a	n/a	n/a	25 Persen	35 Persen	50 Persen	100 Persen	100 Persen	Persentase dari n+1 sub sektor ekonomi kreatif yang terfasilitasi HAKI	DINAS PARIWISATA	
							PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah CBT	n/a	n/a	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	2 CBT	Peningkatan desa wisata yang sudah mandiri (CBT = Community Based Tourism)	DINAS PARIWISATA	
				Meningkatkan kualitas UMKM	Peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro	Meningkatnya kualitas UMKM		Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	65	70	70	70	70	70	70	70	Jumlah usaha mikro binaan tahun ke n yang meningkat omset dan asetnya dibagi jumlah usaha mikro binaan tahun ke n dikali 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Facilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil			Persentase UMKM yang berizin	Persen	78,11 Persen	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	70 Persen	Jumlah usaha mikro yang berizin / jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	55 persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya dibagi jumlah usaha mikro binaan x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Rintisan Desa Preneur	Persen	n/a	9,33 persen	10,67 persen	12 persen	13,33 persen	14,67 persen	17,33 persen	17,33 persen	Rintisan Desa Preneur dibagi seluruh Kalurahan dikali 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian pemasaran pada Desa Preneur	Persen	0 Persen	0 Persen	14 Persen	28 Persen	40 Persen	50 Persen	70 Persen	70 Persen	Desa Preneur yang dipromosikan/dipasarkan dibagi seluruh Desa Preneur yang ditetapkan dikali 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Meningkatkan pertumbuhan industri	Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan	Meningkatnya pertumbuhan industri		Pertumbuhan industri	Persen	1,8	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,3	Jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Pengembangan Kawasan Perindustri Piyungan dan Sedayu-Pajangan			Pertumbuhan industri kreatif	Persen	n/a	0,2	0,31	0,41	0,56	0,84	0,97	0,97	Jumlah industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri kreatif tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIFIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0 Persen	81,5 Persen	85,97 Persen	90,65 Persen	95,32 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%. Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator / target * (100/N)% N akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan) / (jumlah izin yang dikeluarkan) *100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten	Persen	0,20 Persen	0 Persen	0 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	0,22 Persen	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota di SII NAS / Total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab. Kota x 100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan						Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	66,12	67,26	67,88	69,50	70,61	70,61	(Indeks kualitas infrastruktur- kesesuaian pemanfaatan ruang + IRLI + IRB yang setarakan dalam persen) dibagi 4	DPUPKP, DPTR, DLH, BPBD	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Terperuhnya kualitas sarana prasarana publik					Indeks kualitas infrastruktur	Indeks	n/a	n/a	73,71	75,05	76,40	77,47	79,08	79,08	(40% x tingkat kemandapan jalan) + (5% x rasio bangunan gedung laik fungsi) + (20% x Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi + (15% x Penduduk berakses air minum layak) + (15% x Penduduk berakses sanitasi yang layak) + (5% x Penanganan kawasan kumuh)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Tingkat Kemandapan Jalan	Persen	78,02	78,02	78,43	78,84	79,25	79,66	80,07	80,07	(Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantapi)/(Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantapi) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten dan jalan desa)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat kemandapan infrastruktur permukiman (jalan desa)	Persen	80,62	80,62 Persen	81,03 Persen	81,44 Persen	81,85 Persen	82,26 Persen	82,67 Persen	82,67 Persen	(Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi mantapi) / (Jumlah total panjang jalan desa)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemandapan jalan kabupaten	Persen	75,42	75,42 Persen	75,83 Persen	76,24 Persen	76,65 Persen	77,06 Persen	77,47 Persen	77,47 Persen	(Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantapi) / (Jumlah total panjang jalan Kabupaten)*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	n/a	n/a	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,6	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi / (Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana))	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	Persen	n/a	n/a	0	65 Persen	90 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Pemenuhan sarana prasarana pada tahun n dibagi dengan target rencana pembangunan TB secara keseluruhan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	n/a	n/a	10 Persen	20 Persen	30 Persen	40 Persen	50 Persen	50 Persen	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi / Jumlah bangunan gedung pemerintah) *100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR			
												2022	2023	2024	2025							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	71,34 Persen	71,34 Persen	72,84 Persen	74,34 Persen	75,84 Persen	77,34 Persen	78,84 Persen	78,84 Persen	{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator/teknisi/analisis / {jumlah tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten}	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	80,01	80,01	80,37	80,73	81,09	81,45	81,81	81,81	{Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha),ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha),diperbaiki dan dipelihara (ha) di tahun elastisitas / {Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten }*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
							PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	29,93 Persen	29,93 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	50 Persen	50 Persen	{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) / {Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)}*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
								Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persen	82,06 Persen	81,5 Persen	82,4 Persen	83,3 Persen	84,2 Persen	85,1 Persen	86 Persen	86 Persen	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas irigasi kabupaten x100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Penduduk berakses air minum layak	Persen	82,36	82,36	83,56	84,38	85,19	85,98	86,76	86,76	86,76	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dibagi Jumlah penduduk seluruhnya x100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	82,36 Persen	82,36 Persen	83,56 Persen	84,38 Persen	85,19 Persen	85,98 Persen	86,76 Persen	86,76 Persen	{Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten } / {Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten}*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Penduduk berakses sanitasi yang layak	Persen	84,83	84,83	87,86	90,89	93,92	96,95	100	100	100	{Jumlah penduduk dengan akses sanitasi yang layak / {Jumlah total penduduk} * 100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
							PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA PENANGANAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Persen	21,33 Persen	21,33 Persen	22,67 Persen	25,33 Persen	28 Persen	30,67 Persen	33,33 Persen	33,33 Persen	33,33 Persen	Jumlah TPS3R tahun n dibagi dengan jumlah TPS3R ideal (75 unit) di kali 100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	84,83 Persen	84,83 Persen	87,86 Persen	89,89 Persen	91,92 Persen	93,95 Persen	95,98 Persen	95,98 Persen	95,98 Persen	{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubuk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD} / {Jumlah rumah di Kabupaten}*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Persen	n/a	n/a	3,97 Persen	4,6 Persen	5,23 Persen	5,86 Persen	6,49 Persen	6,49 Persen	6,49 Persen	{Panjang drainase ditangani} / {Panjang keseluruhan drainase di Kabupaten} *100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
				Meningkatkan kualitas rumah dan kawasan permukiman	Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik		Penanganan kawasan kumuh	Persen	92,49	92,49	10,59	21,18	31,77	42,36	52,95	52,95	52,95	Luas kawasan kumuh yang tertangani dibagi total kawasan kumuh dikali 100% Tahun 2020 dan 2021 berdasarkan : SK Bupati No. 220 Tahun 2016 selesai di tahun 2021 Tahun 2021 sd 2026 berdasarkan : SK Bupati No. 82 Tahun 2021	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
							PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n} / {jumlah total rencana unit rumah korban yang akan ditangani pada tahun n}*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
							PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	82,99 Persen	82,99 Persen	10,59 Persen	21,18 Persen	31,77 Persen	42,36 Persen	52,95 Persen	52,95 Persen	52,95 Persen	{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) / {Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (ha)}*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
							PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	Persen	98,75 Persen	98,75 Persen	99,18 Persen	99,39 Persen	99,6 Persen	99,8 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	{Jumlah unit rumah layak huni / Jumlah total unit rumah} *100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
							PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terasilitasi PSU} / {Jumlah unit rumah Kabupaten}*100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
				Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan prasarana lalu lintas	Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	Persen	1,83	1,83	1,83	3,66	5,49	7,32	9,15	9,15	9,15	Selisih kejadian kecelakaan lalu lintas n tahun dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline dibagi kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun baseline x 100%	DINAS PERHUBUNGAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	DINAS PERHUBUNGAN		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLA)	Rasio Konektivitas Kabupaten	Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	30,43 Persen	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	DINAS PERHUBUNGAN		
								Kinerja lalu lintas Kabupaten	Angka	0,39	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	0,30 angka	V / C Ratio di Jalan kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN		
			Terpenuhiya kualitas sarana prasarana publik					Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	75,01	80,00	75,03	75,05	75,07	75,10	75,20	75,20	75,20	Pemanfaatan ruang / perencanaan ruang x 100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang Fasilitasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang		Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persen	n/a	n/a	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	74,00	74,00	Rerata capaian penyelenggaraan urusan tata ruang dari sumber dana APBD dan Dana keistimewaan urusan tata ruang	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
							PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	n/a	n/a	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Dokumen raperbup RTBL / target dokumen raperbup RTBL tahun bersangkutan x 100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Persen	n/a	n/a	70 Persen	70,1 Persen	70,2 Persen	70,3 Persen	70,4 Persen	70,4 Persen	70,4 Persen	70,4 Persen	Rerata (dokumen raperbup dan raperda rencana tata ruang / target total dokumen); rekom FPRD atau TKPRD yg disetujui/jumlah total permohonan); (Rekom FPRD atau TKPRD yg disetujui/rekom FPRD atau TKPRD yang diterbitkan + temuan pengawasan yang ditindak lanjut/rekom FPRD atau TKPRD yg disetujui)	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persen	n/a	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	Rerata capaian perencanaan dan pemanfaatan / target capaian tahun bersangkutan x 100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDIRA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah		Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persen	n/a	n/a	74	75	77	81	85	85	Rerata capaian penyelenggaraan urusan pertanahan dari sumber dana APBD dan Dana keistimewaan urusan pertanahan	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Pernangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani) / (Jumlah pengaduan sengketa garapan)*100%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SK, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Persen	n/a	n/a	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	90 Persen	bidang tanah terdaftar, bidang tanah dengan rekam pemanfaatan / total bidang tanah yang menjadi target tahun bersangkutan x 100 %	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	14,98 persen	20,73 Persen	33,03 Persen	35,37 Persen	44,74 Persen	54,58 Persen	64,89 Persen	64,89 Persen	tanah yang dikelola (tanah yang dilakukan penatausahaan (bidang yang telah dilaksanakan pendaftaran ke BPN) akumulatif dari tahun2 sebelumnya) / total tanah kasultanan x 100 %	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
			Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,02	63,02	62,75	63,59	64,42	65,24	66,07	66,07	IKLH = (0.37edKA)+(0.405xIKU)+ (0.219dKL)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penanganan pencemaran lingkungan hidup Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,80	56,00	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,00	KA = I + j + Ik + Im	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
								Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,18	90,00	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00	89,00	IKUd = 100 - [(50/0,9) x (Icu-0,1)]	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
								Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	54,82	61,20	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00	65,00	IKTL = 100 - [(84,3 - (LTL/LWK) x 100)] x (50/54,3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Persen	66,67 Persen	n/a	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	90 Persen	90 Persen	Jumlah penanganan sumber pencemaran air dan udara yang dilaksanakan dibagi jumlah standar/ideal penanganan sumber pencemaran air dan udara dikali 100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	27,79 Persen	n/a	30 Persen	32 Persen	34 Persen	36 Persen	38 Persen	38 Persen	Jumlah luas tutupan lahan pada tahun n dibagi jumlah luas wilayah dikali 100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Persen	n/a	n/a	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	Jumlah pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n dikurangi Jumlah pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup tahun n-1 dikali 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Penghargaan	1 penghargaan	n/a	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	5 penghargaan	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup skala provinsi/ nasional	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penanganan pencemaran lingkungan hidup Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem Pengawasan dan ketersediaan informasi lingkungan hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	Persen	n/a	n/a	83,33	76,67	75	69	66,67	66,67	(Jumlah penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak melanggar izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten) dibagi (usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan)*100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	0 Persen	n/a	14,29 Persen	57,14 Persen	85,71 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah perencanaan yang dilakukan pada tahun n dibagi jumlah perencanaan yang harus disusun dikali 100 persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan penatnatan pengelolaan limbah B3	Persen	n/a	n/a	31,35 Persen	33,10 Persen	34,84 Persen	36,58 Persen	38,32 Persen	100 Persen	Jumlah usaha yang merindakan/juati persetujuan teknis (taat) dibagi jumlah persetujuan lingkungan yang dikeluarkan dikali 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan	Persen	n/a	n/a	16,67 Persen	23,33 Persen	25 Persen	31 Persen	33,33 Persen	34 Persen	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota x 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Persen	100 Persen	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Pengaduan masyarakat yang tertangani) dibagi (total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi) x 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Pengurangan dan penanganan sampah	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Capaian pengelolaan sampah	Persen	61,16	61,82	63,33	65,51	67,65	69,23	72,88	72,88	(Total volume sampah yang dapat dikurangi + Total volume sampah yang dapat ditangani) dibagi Total volume timbulan sampah kabupaten x 100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
							PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	41,36 Persen	41,36 Persen	42,42 Persen	44,16 Persen	45,87 Persen	46,86 Persen	50,07 Persen	50,07 Persen	(Total volume sampah yang dapat ditangani) / (Total vol timbulan sampah kabupaten)*100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Terwujudnya penurunan risiko bencana					Indeks Risiko Bencana	Indeks	187,2	181,26	175,51	169,94	164,55	159,33	154,27	154,27	IRB= Bahaya*Kerentanan/Kapasitas	BPBD	BNPB
				Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	Assesment 71 indikator	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	n/a	n/a	0	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Cakupan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten dibagi SRS pada tahun tertentu	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	20 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	35 Persen	40 Persen	45 Persen	45 Persen	Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara usia diatas 10 tahun di kawasan rawan bencana dikali 100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
							PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN PD	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH	PENGUKUR INDIKATOR
												2022	2023	2024	2025	2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana dikali 100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
								Indeks Pemulihan Pasca-bencana	Indeks	n/a	n/a	n/a	45 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	65 Persen	Penilaian pemulihan Infrastruktur Pendidikan; Infrastruktur Kesehatan dan Rumah Tinggal; dan Infrastruktur Ekonomi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengajian Risiko dan Perencanaan Terpadu Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana		Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan penyelamatan	menit	14,48	14,46	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
							PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	(Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah) ditambah (jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan / atau di bawah pembinaan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah) dibagi (Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten)*100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian 5 Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat						Tingkat Kemiskinan	Persen	13,50	13,50	13,37	12,90	12,80	12,05	11,50	11,50	Persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)	DINAS SOSIAL	BPS BANTUL
			Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)					Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	72.101	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.668	70.668	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	DINAS SOSIAL	Dinas Sosial
				Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel Pembangunan infrastruktur ramah difabel		Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang dilayani dan ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah PPKS yang terlayani dan tertangani dibagi jumlah PPKS dikali 100%	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persen	55 Persen	57 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	85 Persen	Jumlah PSKS yang mampu menangani PPKS dibagi jumlah penduduk Bantul dikali 100%	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantai (indikator SPM)	Persen	80 Persen	80 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah PPKS/PPKS dikali 100%	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen	n/a	n/a	70 Persen	70 Persen	70 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah PPKS yang diikutsertakan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dibagi jumlah PPKS Kabupaten dikali 100%	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Persen	50 persen	50 persen	55 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah PPKS yang masuk DTKS penerima jaminan dan Bantuan sosial dibagi jumlah PPKS Bantul dikali 100%	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	99 Persen	57 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dibagi jumlah penduduk Bantul dikali 100%	DINAS SOSIAL	
							PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen	n/a	75 Persen	75 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dibagi jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang terdata dikali 100%	DINAS SOSIAL	
								Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,12	95,18	95,50	96,00	96,50	96,75	96,90	96,90	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BPS BANTUL
			Terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,78*	n/a	69,36	71,01	72,66	74,31	75,96	75,96	IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BPS BANTUL
				Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	Prevalensi	0,47	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	0,37	0,37	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi Jumlah penduduk perempuan diatas 18 tahun dan jumlah anak dikali 1.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN KESTIMAWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Desa Prima	Persen	30,67 Persen	37,33 Persen	37,33 Persen	38,67 Persen	40 Persen	41,33 Persen	42,67 Persen	42,67 Persen	Desa prima yg ditetapkan dibagi semua Kelurahan dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

CASCADING RPJMD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 - 2026

NO (1)	MISI (2)	TUJUAN (3)	SASARAN DAERAH (4)	STRATEGI (5)	ARAH KEBIJAKAN (6)	SASARAN PD (7)	PROGRAM (8)	INDIKATOR (9)	SATUAN (10)	CAPAIAN 2020 (11)	KONDISI AWAL (2021) (12)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026) (18)	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR (19)	PERANGKAT DAERAH (20)	PENGUKUR INDIKATOR (21)
												2022 (13)	2023 (14)	2024 (15)	2025 (16)	2026 (17)				
							PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	57 persen	57 persen	62 Persen	66 Persen	69 Persen	72 Persen	75 Persen	75 Persen	Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD dibagi Jumlah seluruh belanja langsung APBD dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	0.0004	0.0004	0.00035	0.00032	0.00031	0.00028	0.00026	0.00026	Jumlah perempuan korban kekerasan dibagi 100.000 penduduk perempuan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	6 persen	6 persen	7 persen	8 Persen	9 Persen	10 Persen	11 Persen	11 Persen	Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam lembaga dibagi jumlah penduduk perempuan Bantul dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
								Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama	KLA	KLA	KLA	Predikat berdasarkan jumlah rentang (range) nilai: Pratama: 500-600, Madya (600-700), Nindya (700-800), Utama (800-900), KLA (Ib dr 900).		KEMEN PPPA
				Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak Menyediakan Layanan Ramah Anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA		Nilai KLA	Angka	632,9	n/a	730	830	890	910	950	950	nilai Evaluasi KLA		
							PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIA)	Cakupan desa layak anak	Kahurahan	n/a	n/a	15 Kahurahan	30 Kahurahan	45 Kahurahan	60 Kahurahan	75 Kahurahan	75 Kahurahan	Jumlah Desa layak anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	n/a	70 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dibagi jumlah anak Kabupaten Bantul dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
				Meningkatkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk Pemberdayaan lembaga masyarakat dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran penduduk terkendali		Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	Angka	2,56	2,54	2,5	2,45	2,4	2,35	2,3	2,3	Rata-rata jumlah anak per keluarga = Jumlah anak dibagi Jumlah keluarga	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Angka	1,67	1,67	1,66	1,65	1,64	1,63	1,62	1,62	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	Persen	n/a	n/a	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	77,2 Persen	(Jumlah peserta KB Aktif Modern) / (Jumlah Pasangan Usia Subur)*100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok Tribina	Persen	82 Persen	82,5 Persen	83 Persen	84 Persen	84,5 Persen	85 Persen	85,5 Persen	85,5 Persen	Jumlah kelompok Tribina yang melaksanakan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dibagi Jumlah Kelompok Tribina dikali 100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,
Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika"

Even, we plan to
Touch The Sky



BAPPEDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
JL R.W. Monginsidi 01 Kompleks Parasamya Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
<https://bappeda.bantulkab.go.id>